

## STRATEGI PEMENUHAN SUMBER DAN PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PAUD

Erma Windu Susanti<sup>1</sup>, Triana Sayekti Peni Puji Lestari<sup>2</sup>, Ahmad Farian Listianto<sup>3</sup>  
[ermawindu@gmail.com](mailto:ermawindu@gmail.com)<sup>1</sup>, [triana.sayekti123@gmail.com](mailto:triana.sayekti123@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahmadfarian@gmail.com](mailto:ahmadfarian@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas PGRI Semarang

### ABSTRAK

Pendanaan pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk keberlanjutan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pendanaan pendidikan di Indonesia wajib dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD, dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Namun, tantangan dalam pemenuhan dan pengalokasian pembiayaan pendidikan, khususnya di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu diperhatikan secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemenuhan sumber dan pengalokasian pembiayaan pendidikan di lembaga PAUD di Kecamatan Sumowono. Menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi sumber pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk investasi, operasional, dan bantuan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan dana pendidikan PAUD yang lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Pendidikan, Sumber Pembiayaan, Pengalokasian Dana, PAUD.

### ABSTRACT

*Educational funding is a crucial element for the sustainability and quality of education in Indonesia. According to Law No. 20 of 2003, education funding in Indonesia must be allocated at least 20% of the national and regional budgets (APBN and APBD), with funding sources coming from the central government, local governments, and the community. However, challenges in fulfilling and allocating educational financing, particularly in Early Childhood Education (PAUD), require serious attention. This study aims to explore strategies for sourcing and allocating educational funding in PAUD institutions in the Sumowono District. Using a descriptive approach with both quantitative and qualitative methods, the research identifies funding sources from the government, local governments, and the community, as well as how these funds are allocated for investment, operations, and educational assistance. The findings are expected to provide policy recommendations for more effective and efficient management of PAUD educational funding.*

**Keywords:** Education Funding, Funding Sources, Fund Allocation, Early Childhood Education (PAUD).

### PENDAHULUAN

Pendanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan, di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan sumbangan berupa zakat, wakaf, hibah, dan sumber lainnya. Berdasarkan PP 48 tahun 2008, biaya pendidikan dibagi menjadi biaya satuan pendidikan, biaya pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Pada artikel ini, fokus penelitian adalah mengenai strategi pemenuhan sumber dan pengalokasian pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan PAUD.

Alasan Praktis: Penelitian ini penting untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh lembaga PAUD di Kecamatan Sumowono dalam memenuhi sumber pembiayaan dan mengalokasikannya secara tepat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan

bagi pemerintah dan masyarakat terkait cara meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang PAUD. Alasan Teoretis: Penelitian ini akan memperkaya kajian tentang pembiayaan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD. Studi ini akan memberikan kontribusi terhadap teori-teori manajemen pendidikan dan pembiayaan pendidikan, yang selama ini lebih banyak fokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumowono pada lembaga PAUD, dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih sekolah yang bersedia membuka akses laporan keuangan mereka. Sampel penelitian terdiri dari kepala sekolah dan bendaharawan sekolah yang memiliki akses informasi terkait informasi terkait keuangan sekolah.

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi metode dengan pengisian angket dan wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan bendaharawan.

- Instrumen Kualitatif: Protokol wawancara yang disusun oleh peneliti dan dilaksanakan untuk menggali informasi lebih dalam tentang pemenuhan dan pengalokasian dana pendidikan.
- Instrumen Kuantitatif: Angket yang disebarakan langsung ke responden (Kepala Sekolah dan Bendaharawan). Data kuantitatif kemudian dianalisis menggunakan program Microsoft Excel.
- Triangulasi Data: Untuk menjaga keabsahan data, peneliti juga memeriksa dokumen keuangan sekolah.

Analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Berdasarkan hasil angket, wawancara, dan penelusuran dokumen keuangan dari lima lembaga PAUD di Kecamatan Sumowono, diketahui sumber pembiayaan pendidikan berasal dari tiga pihak utama, yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Rincian pemenuhan sumber pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Pembiayaan dari Pemerintah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD menjadi sumber pendanaan terbesar yang diberikan oleh Pemerintah. Dari hasil penelitian, rata-rata BOP yang diterima setiap lembaga sebesar Rp 20.000.000 per tahun. Namun, pencairan dana sering mengalami keterlambatan hingga triwulan kedua, sehingga memengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional di awal tahun ajaran.
2. Sumber Pembiayaan dari Pemerintah Daerah Hanya 60% lembaga PAUD yang mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Daerah berupa hibah pendidikan atau bantuan non-fisik. Hibah ini rata-rata sebesar Rp 5.000.000 per tahun. Namun, dana ini lebih sering digunakan untuk mendukung program peningkatan mutu, seperti pelatihan guru dan penyediaan media pembelajaran.
3. Sumber Pembiayaan dari Masyarakat Kontribusi masyarakat berupa sumbangan sukarela rata-rata mencapai Rp 10.000 per siswa per bulan. Pendapatan dari masyarakat digunakan untuk menutupi kekurangan operasional, seperti pembayaran listrik, internet, dan pembelian bahan ajar. Namun, terdapat kendala dalam penggalangan dana ini, karena keterbatasan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

### **Analisis**

Kendala utama dalam pemenuhan sumber pembiayaan adalah ketergantungan tinggi pada BOP PAUD, yang cenderung tidak mencukupi kebutuhan tahunan lembaga. Oleh

karena itu, strategi diversifikasi sumber dana, seperti kerja sama dengan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), perlu dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan lembaga PAUD.

### **Pengalokasian Penggunaan Dana Pendidikan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pendidikan yang diterima lembaga PAUD dialokasikan untuk tiga kategori utama, yaitu investasi, operasional, dan bantuan pendidikan. Rincian pengalokasian adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana untuk Investasi Investasi pendidikan meliputi pengadaan alat peraga edukatif (APE) dan renovasi fasilitas. Rata-rata dana investasi mencapai 25% dari total dana tahunan yang diterima. Salah satu lembaga menggunakan Rp 7.500.000 untuk pengadaan mainan edukatif berbasis STEM, yang membantu meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif anak.
2. Penggunaan Dana untuk Operasional Penggunaan dana untuk operasional mencakup gaji pendidik, biaya listrik, internet, dan alat tulis kantor (ATK). Rata-rata, sekitar 60% dana tahunan digunakan untuk kebutuhan operasional. Dalam beberapa lembaga, pembayaran gaji guru non-PNS (Rp 500.000–Rp 750.000 per bulan) menjadi prioritas utama dalam pengeluaran operasional.
3. Penggunaan Dana untuk Bantuan Pendidikan Bantuan pendidikan berupa subsidi SPP atau beasiswa untuk siswa kurang mampu hanya dialokasikan oleh 40% lembaga. Besaran dana yang dialokasikan rata-rata Rp 2.000.000 per tahun, yang digunakan untuk membebaskan biaya bulanan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

### **KESIMPULAN**

Sebagian besar lembaga PAUD memprioritaskan dana untuk operasional, yang merupakan kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Namun, porsi dana untuk investasi dan bantuan pendidikan masih terbatas. Strategi pengalokasian dana yang lebih seimbang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan investasi pendidikan dan mendukung siswa dari keluarga kurang mampu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemenuhan sumber dan pengalokasian dana di lembaga PAUD di Kecamatan Sumowono belum optimal. Ketergantungan pada satu atau dua sumber utama (BOP PAUD dan kontribusi masyarakat) menyebabkan keterbatasan dalam fleksibilitas pendanaan. Dalam pengalokasian, sebagian besar dana habis untuk operasional, sementara investasi dan bantuan pendidikan belum menjadi prioritas di beberapa lembaga.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan, diperlukan:

1. Penyusunan rencana anggaran berbasis kebutuhan prioritas.
2. Diversifikasi sumber pendanaan melalui CSR, crowdfunding, atau kemitraan lainnya.
3. Evaluasi rutin terhadap efektivitas penggunaan dana untuk mendukung keberlanjutan pendidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bray, M. (2007). *Finance and Financing of Education: Policy, Practice and Priorities*. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Darman. (2019). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar di Kabupaten Bone. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 21(2), 45-57.
- Fatimah, N., & Wahyudi, A. (2022). Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Daerah Rural Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 9(4), 78-91.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa. (2015). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Teori dan Praktik. Bandung: Rosda.
- Nurkolis. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, D. S. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Layanan Pendidikan di PAUD. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 34(3), 112-124.
- Santoso, T., & Lestari, S. (2020). Analisis Sumber dan Pengelolaan Dana Pendidikan di Lembaga PAUD di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1), 15-28.
- Supriadi, D. (2002). Pengelolaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryosubroto. (2004). Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utami, R. (2018). Strategi Optimalisasi Dana Pendidikan di Sekolah Berbasis Swadaya. *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, 7(3), 65-80.